

PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

M. Subari

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia

Abstract: The role of Islamic Education in the global area is very strategic in resolving socio-cultural problems, especially the problem of poverty, because the problem of poverty is closely related to changing the behavior and mentality of the poor to be not poor and empowered and independent. and poor. At one point the Prophet Muhammad was visited by a friend who was poor and complained about his poverty. How did Rasul SAW educate and direct those who suffer poverty, Rasul SAW did not give money and food but Rasul SAW told another friend to take an ax at home the Apostle SAW continued to give the ax to the Apostle to the friend who complained about his poverty, while the apostle asked the one who complained about poverty, did you know the use of the ax you under? Then the Apostle SAW explained the use of the ax that is down you go to hu tan to look for firewood and after that you sell to the market, you get money, you buy food and it can be done every day. That's how rasulSAW educates and tackles poverty, People are given working capital, have permanent jobs, have regular income and can provide for his family and not depend on others. This is a big problem in poverty alleviation because it is wrong in handling poor people to be fed and for consumptive money not to be productive so that hundreds of millions of dollars have been used up until now the poverty rate does not decrease even because it is not imitating Islamic education carried out by Rasul SAW managed to overcome poverty independently and thoroughly educate people not to become lazy people sitting idly by but educating people to become non-lazy workers, entrepreneurs, benefactors not beggars with jorgan hands above better than the hands below.

Keywords: Role, Islamic Education, Prevention, Poverty.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi demensional, mencakup masalah politik, ekonomi, aset, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

1. Dimensi politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.
2. Dimensi sosial, sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya masyarakat miskin ke dalam institusi sosial yang ada dan terintegrasikan budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka.

3. Demensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
4. Demensi aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk fase kualitas sumberdaya manusia, peralatan kerja, modal dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki dan dirubah, yaitu kearah pengokohan kelembagaan masyarakat dan pemberian modal kerja dan usaha dan entrepreneurship. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat yang benar-benar mampu mejadi wadah untuk memperjuangkan kaum miskin, yang mandiri, berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Penguatan organisasi masyarakat yang dimaksud juga dititik beratkan pada upaya pengolahan sebagai perannya sebagai motor penggerak dalam “melembagakan” dan ”memberdayakan” kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri di kelurahan mereka, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multidemensial dan struktural. Khususnya yang terkait dengan demensi, pendidikan, ekonomi serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya maupun menyuarkan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Kepada organisasi masyarakat warga yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk mengelola dana abadi penanggulangan kemiskinan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan baik berbentuk kredit mikro maupun dana bergulir maupun hibah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat oleh masyarakat contoh untuk beasiswa anak orang yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.¹

Kemiskinan sebagai bentuk ancaman dan merupakan masalah besar yang telah ada sejak dulu sampai sekarang terutama bagi negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Pertanyaannya maukah umat islam menanggulangi kemiskinan dan maukah orang miskinnya untuk bergerak dan merubah nasib dari tidak berdaya menjadi berdaya. Menurut mufasir Al-Qur’an Muhammad Quraishy Shihab melihat dari akar kata “miskin” berarti diam atau tidak bergerak, maka dapat diperoleh pesan faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak mau bergerak dan berusaha.²

¹ Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Pedoman Umum P2KP II Cetakan Pertama, TS, 2002, hal 1-2

² Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al – Qur’an, hal 382

Keengganan berusaha adalah penganiayaan diri sendiri, berarti tidak mau merubah nasibnya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran islam. Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang kalau dirinya sendiri tidak ada upaya atau ihtyar untuk merubah dirinya sendiri.³ Sedangkan ketidak mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Lebih jelas lagi, jaminan rizki yang dijanjikan Allah SWT ditujukan kepada makhluk yang namanya dabbah arti harfiyahnya bergerak. Hal ini sesuai dengan ayat AL-Qur'an yang artinya apa saja yang melata di atas bumi rizqinya dijamin Allah SWT.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas kaum muslimin berkuajiban untuk memberdayakan masyarakat miskin baik secara kolektif maupun individu. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat miskin butuh peran dan dukungan yang memadahi dari pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok peduli, LSM, profesional, perguruan Tinggi, Ulama'. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang menjadi ujung tombak adalah kegiatan ekonomi diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian modal usaha secara mikro pada masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro kecil atau masyarakat miskin yang akan berusaha di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/LKM berada dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Pengelolaan Kemiskinan

Pada hakikatnya pengelolaan kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pertama kemiskinan struktural keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya pemerintahan yang otoriter dan meliteristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, merajalelanya praktek korupsi kolosi dan nepotisme (KKN) kebijakan ekonomi yang tidak adil serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertantu. Kelompok yang kaktor kedua kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah baik yang berkaitan dengan sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang mengitarinya, misalnya faktor ektern kesuburan tanah dan bencana alam. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kemiskinan yang kultural adalah keadan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu yang melekat pada kebudayaan masyarakat terutama yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan dalam kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri, misalnya kecendrungan untuk idup boros, kurang menghargai waktu dan kurang berminat untuk berprestasi.⁵

1. Penyebab terjadinya Kemiskinan

³ Kemenag, RJ, Terjemahan Al – Qur'an hal 609

⁴ Kemenag, RJ, Terjemahan Al – Qur'an hal 709

⁵ Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain: 1) Pelaksanaan suatu kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. 2) Ekonomi dikuasai kelompok tertentu, terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) pada pemegang kebijakan.⁶ 3). Kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat enggan mengeluarkan zakatnya. 4) Tidak ada pengelolaan zakat dan shodaqoh dari konsumtif menjadi produktif. 5) Tidak ada kepedulian pihak lain untuk memberdayakan masyarakat miskin.⁷

2. Kreteria Kemiskinan.

Kreteria Kemiskinan di Indonesia berbeda-beda, kreteria yang dikeluarkan BPS, BKKBN, DINKES sangat berbeda-beda, apa lagi kreteria kemiskinan yang disepakati oleh masyarakat di keluarkan atau yang ada program P2KP, PNPM nya tergantung kesepakatan masyarakat setempat yang disepakati dalam rembuk refleksi kemiskinan. Kreteria kemiskinan yang cocok sesuai dengan situasi dan kondisi adalah kreteria Kemiskinan yang dikemukakan dalam Agama Islam yang disebutkan dalam AL-Qur'an surat Taubatayat 60 yang artinya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang Fakir, orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang sedang dalam perjalanan.⁸ Dalam ayat tersebut jelas kreteria kemiskinan yang pertama adalah orang Fakir, baru yang kedua orang miskin karena orang Fakir kondisinya lebih parah dari pada orang miskin. Kemudian kebutuhan pokok makan sehari 1 Mut (6 ons) hal ini sesuai dengan tebusan orang yang meninggalkan puasa Romadhon sehari harus memberikan makan orang miskin satu mut (6 ons) dan makan ikan daging seminggu 2 kali kalau kurang dari itu termasuk miskin.

3. Tahapan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam tahapan pelaksanaan penggulungan Kemiskinan yang harus dipersiapkan adalah pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang anggotanya dari relawan-relawan yang mempunyai kepedulian dengan masalah kemiskinan dan yang menggerakkan orang fakir dan miskin.

Dalam Pelaksanaan Penggulungan Kemiskinan di tingkat desa atau kelurahan yang selalu mendampingi yang selalu mendampingi dan mendidik, mengarahkan dan memberdayakan masyarakat fakir miskin dengan merubah mineset orang fakir miskin dari mental malas, tidak mau bekerja, atau mental pengemis menjadi mental pekerja keras, mental pengusaha, kreatif, inovatif. Ini tidak mudah seperti seperti membalik tangan.

Jadi butuh pendamping yang ulet, sabar, kreatif, inovatif, dan mempunyai keahlian khusus yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, interpreneurship, pendidikan Agama Islam, kualifikasi sarjana S1 segala jurusan.⁹

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman untuk masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman.

⁶ Dirjen Cipta Karya, Pedoman Pelaksanaan PNPM MP, hal 12

⁷ Jauzi Syafi'I, Zakat Pemberdayaan Masyarakat Miskin, hal 9

⁸ Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, Al - Qur'an dan Terjemahannya hal 187

⁹ Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir, Jakarta, 2008, hal 17

- a. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
- b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat.
- c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat jasanya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
- d. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM).
- e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Beberapa perinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM dan UPK antara lain adalah:

- a. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat desa atau kelurahan sasaran dan bukan milik perorangan.
- b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membentuk program penanggulangan kemiskinan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin kelompok sasaran utama.
- c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi pada proses pembelajaran untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan produktif lainnya.
- d. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM/BKM sebagai dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggung jawab kepada LKM/BKM.
- e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditentukan.
- f. Manager dan petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh Program penanggulangan kemiskinan.
- g. UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan sistem pelaporan keuangan yang memadai.
- h. UPK mendapat pengawasan baik oleh UPK atau BKM melalui pengawas UPK yang ditunjuk oleh LKM atau BKM.¹⁰

Pendampingan pada BKM atau UPK atau KSM, Pendamping atau fasilitator bertugas untuk: Menjaga proses agar sesuai dengan tujuan, strategi prinsip pengelolaan pinjaman bergulir. Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat miskin dalam hal penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan mereka serta kegiatan produktif lainnya. Mendorong proses pembelajaran bagi pengelola pinjaman bergulir agar dana yang berupa modal usaha dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi perbaikan Kesejahteraan masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya bisa dilakukan secara individu dapat juga melibatkan orang lain. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadakan

¹⁰ Konsultan Manajemen Wilayah (KMW XII, Kasbang, 2004, hal 17

tentang kefakiran dan kemiskinannya. Dia menceritakan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya setiap hari. Rasulullah SAW memberikan solusi pada sahabat yang mengadukan tentang kefakiran dan kemiskinan. Lalu Rasulullah menyuruh sahabat yang ada disampingnya Rasulullah SAW untuk mengambil kapak di rumah Rasul, kemudian kapak itu diberikan kepada orang yang mengadukan kefakiran dan kemiskinan ya tadi, lantas orang yang menerima kapak itu bertanya pada Rasulullah SAW, untuk apa kapak ini ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab “kapak ini kamu bawa pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, setelah dapat kayu bakar kamu jual ke pasar kamu dapat uang, uang itu kamu belikan makanan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu dan itu bisa kamu lakukan setiap hari.”¹¹

Dari contoh praktis yang dilakukan Rasulullah SAW, cara mendidik dan memberdayakan orang fakir dan miskin si miskin tidak diberi makan, tidak diberi uang, tetapi diberi kapak sebagai modal kerja dan usaha. Karena Rasulullah tau bahwa orang yang mengadukan kefakiran dan kemiskinan itu mempunyai potensi atau skill berupa tenaga untuk usaha. Sehingga dengan modal usaha dia dapat pekerjaan tetap dan penghasilan tetap dan mandiri tidak menggantungkan orang lain mintak mintak.

4. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat

Tahapan pembentukan Badan keswadayaan Masyarakat BKM, pertama dibentuk panitia ditingkat desa atau kelurahan, panitia ini bertugas melaksanakan (pemilu BKM), penjaringan utusan ditingkat basis atau Rt, dan melibatkan ketua Rt setempat untuk memilih utusan ditingkat Rtn 3 orang untuk dicalonkan dan dipilih menjadi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ditingkat desa atau kelurahan, panitia pemilu BKM berkewajiban untuk merekap siapa utusan yang dipilih ditingkat Rt menjadi jumlah utusan ditingkat desa atau kelurahan. Untuk selanjutnya panitia pemilu BKM melaksanakan pemilihan anggota BKM dengan cara semua nama utusan yang direkap dan ditempel oleh panitia. Yang berhak dipilih dan memilih diantara nama-nama utusan yang tercantum dalam rekap daftar nama utusan atau calon yang tertempel didepan. Cara memilih calon BKM, setiap utusan atau calon punya hak memilih 3 orang nama yang berbeda diantara daftar nama calon dan tidak boleh 1 calon atau utusan memilih 3 nama calon yang sama, sehingga nanti siapa yang namanya terpilih dengan suara terbanyak akan jadi BKM. Dan sebelum pemilihan anggota BKM panitia supaya mengumumkan atau memberitahukan dan wawasan bahwa :

- a. Yang terpilih menjadi anggota BKM tidak dapat gaji harus ikhlas mencari ridho Allah SWT untuk menanggulangi Kemiskinan.
- b. Mempunyai kepedulian terhadap nasib orang miskin.
- c. Jujur dalam mengeban amanah.
- d. Pandai dan kreatif serta inovatif.
- e. Pinter Kober dan bender(PKB)
- f. Berniat untuk beribadah dalam menanggulangi Kemiskinan

¹¹ Masbahul Munir, Perpecahan Masalah Kemiskinan Zaman Rosul SAW, Surabaya, Dona, 2008, hal 10

Agar anggota BKM yang terpilih betul-betul orang yang ikhlas mau bekerja diniati ibadah mencari ridho Allah SWT. Berdasar hasil perolehan suara direngking, perolehan suara yaitu yang menjadi anggota BKM sekaligus siapa yang memperoleh suaranya yang paling banyak menjadi kordinator BKM. dan jumlah anggota BKM/LKM minimal 9 orang maksimal 12 -13 orang, dipilih rengking perolehan suara sampai rengking yang ke 12 -13 orang.

Selanjutnya anggota BKM/LKM mempunyai tugas dan bekerja sama dengan ketua Rt sejumlah Rt yang ada di Desa/Kelurahan setempat bekerja sama melaksanakan pemetaan swadaya masyarakat, mencari orang miskin di tingkat Rt di desa/Kelurahan masing-masing, sehingga ketemu dan diketahui secara tepat dan akurat jumlah orang fakir miskin ditingkat Rt disepakati di desa atau kelurahan. Sebelum melaksanakan pemetaan swadaya masyarakat (metani atau mencari orang fakir miskin di tingkat basis/Rt disepakati oleh BKM dan Rt, bahwa kriteria fakir miskin telah disepakati sebagai berikut :

- a. Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak punya pekerjaan tetap.
- b. Orang miskin orang yang mempunyai pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pada umumnya (sandang, pangan , papan).
- d. Orang tidak bisa makan 3 kali sehari
- e. Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, atau punya tempat tinggal warisan dari orang tuanya atau orang lain tapi tidak punya penghasilan tetap.
- f. Kebutuhan pokok makan setu hari 1 mut (6 ons) dan makan daging satu minggu 2 kali, kalau dari itu termasuk miskin (menurut Islam).

Setelah diketahui satu desa atau kelurahan jumlah penduduk miskinnya, lalu dikelompokkan orang fakir dan miskin yang masih umur produktif atau mempunyai potensi yang dapat diberdayakan (yang punya potensi, keterampilan, usaha, skill dll), kemudian dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan potensi yang mereka miliki .setiap kelompok beranggotakan minimal 3 orang ,maksimal 5 orang sesuai dengan potensi dan klasifikasi usaha masing-masing atau dikenal dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), mereka mengelompokkan diri dengan jenis usaha mikro kecil jasa dll. Dana pinjaman bergulir di kelola oleh Unip Pengelolaan Keuangan (UPK) yang amanah yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LKM atau BKM) di tingkat desa atau kelurahan.¹²

Sebelum mereka diberikan pinjaman modal bergulir mereka diberi tausiyah tentang uang pinjaman dalam islam, niatan usaha untuk merubah nasib dalam AL-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengajarkan Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah maksudnya yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta itu semua untuk merubah mentalnya orang miskin supaya menjadi mental pekerja, pengusaha, Intrepreneursip agar jadi orang pemberi dermawan, disamping itu mereka dipelajari dan dilatih untuk

¹² Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir, hal 12

menggunakan uang modal usaha dan manajemen keuangan sederhana setelah itu baru diberikan modal usaha yang dibutuhkan.

5. Sasaran

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin berpendapatan rendah di wilayah desa atau kelurahan, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin.¹³

6. Pendanaan

Pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ditingkat desa atau kelurahan bisa diambil dari dana hibah dari pemerintah, dana dari Zakat dan shodaqoh CSR nya perusahaan, dermawaan yang punya kepedulian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode yang penulis gunakan adalah studi kasus Penanggulangan Kemiskinan di tiga Kelurahan kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Kelurahan Gempeng kecamatan Bangil
2. Kelurahan Kauman kecamatan Bangil
3. Kelurahan Kidul Dalem kecamatan Bangil

Ke Tiga Kelurahan itu dianggap berhasil melaksanakan program penanggulangan Kemiskinan terutama dalam menjalankan dana bergulir untuk orang fakir dan miskin dari tidak mempunyai modal usaha sampai berhasil mempunyai modal usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Hasil Penelitian

Sebagai contoh studi kasus di kelurahan Gempeng kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan pertama Pak Ahsan seorang keluarga fakir miskin pekerjaannya tukang becak tidak mempunyai becak sendiri tapi menyewa,sewanya sehari Rp 7.500,- setelah mengikuti program penggulungan kemiskinan di kelurahan Gempeng diberikan modal kerja yaitu dibelikan Becak seharga Rp.1.000.000,- disuru mengangsur 10 kali perbulannya Rp 114.000,- dan Dia mampu mengangsur 10 kali sehingga Becak itu sudah menjadi milik sendiri sebagai modal kerja.Untuk menambah dan meningkatkan modal usahanya Dia mempunyai hak untuk meminjam modal yang lebih besar lagi yaitu pinjam Rp.2.000.000,- untuk membeli Becak baru seharga Rp.2.000.000,-

Diangsur 10 kali perbulan mengangsur Rp 228.000,-Dia sudah dapat melinasi 10 kali untuk pinjaman yang kedua sudah lunas tahun 2016.untuk pinjaman yang ke-3 sebesar Rp 2.000.000,- tahun 2017 sudah dilunasi .jadi kondisinya saat ini sudah bukan miskin lagi mempunyai aset modal kerja berupa Becak tiga buah Becak, yang satu buah dipakai kerja sendiri,yang satu dipakai anaknya yang satu disewakan orang lain,dahulu dia menyewa Becak pada orang lain untuk bekerja sekarang sudah berubah mempunyai aset dapat disewakan

¹³ Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir, hal 4

orang lain dan kesejahteraannya meningkat karena mentalnya berubah dan dapat meninggalkan kebiasaan yang jelek dari kebanyakan tukang Becak yaitu berjudi sesama tukang becak.

Contoh yang ke-2 studi kasus di kelurahan Kidul dalem Kecamatan Bangil Kabupaten pasuruan adalah Ibu Haniah, seorang janda mempunyai anak satu perempuan. Dia termasuk keluarga miskin yang terdaftar dalam program Penanggulangan kemiskinan di kelurahan Kidul dalem. Dia seorang pekerja trampil buruh tukang border yang tidak mempunyai mesin jahit sendiri menyewa orang lain satu bulannya Rp.5000,- Dia dibelikan Mesin jahit manual seharga Rp. 750.000,- diangsur 10 kali satu bulannya Rp.86.250,- Pinjaman pertama dapat dilunasi Oktober 2015. Dia punya hak pinjam lebih besar lagi, dia mintak dibelikan mesin Juki yang pakai tenaga listrik seharga Rp.1.500.000,- diangsur 10 kali yaitu angsuran perbulan Rp.172.500,- Pinjaman kedua dapat dilunasi pada bulan Agustus 2016. Dia punya hak pinjam lebih besar lagi yaitu maksimal pinjamannya Rp.3.000.000,- dengan angsuran 10 kali yaitu besar angsuran Rp345.000,- Dia sudah berdaya asalnya tidak mempunyai mesin jahit sendiri masih menyewa sekarang sudah memiliki mesin 4 buah, yang manual dipakai sendiri yang mesin juki dipakai anaknya yang dua disewakan. Jadi sudah berdaya bukan miskin lagi, untuk pinjam yang lebih besar lagi lebih Rp.3.000.000,- tidak bisa aturan dari program ini melayani usaha mikro kecil, untuk bisa berkembang jadi pengusaha butuh modal besar harus dilarikan ke Bank Konvensional.

Contoh studi kasus yang ke-3 di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil yaitu Pak Kayat Tukang Sayuran dan Mlijo (Keliling Pakai Becak) di pinjami modal usaha sebesar Rp.1.000.000,- dengan angsuran Rp. 114.000,- perbulan di angsur 10 kali lunas angsuran ke-10 tgl 15 Desember 2015. Punya hak pinjam lebih besar dar pinjaman pertama yaitu Rp.2.000.000,- diangsur 10 kali yaiyu Rp.228.000,- perbulan dapat melunasi pada bulan Oktober 2016. Pinjaman yang ke-3 lebih besar lagi yaitu Rp. 3.000.000,- di angsur 10 kali degan angsuran perbulannya Rp. 171.000,- dan dapat dilunasi angsuran ke-10 bulan Agustus 2017. Dia mempunyai aset modal usaha mikro kecil cukup, dia ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi dengan memakai tosa bukan becak lagi tetapi tidak bisa dilayani oleh program ini karena pinjaman modal usaha program ini maksimal Rp 3.000.000,- lebih dari itu harus dilarikan ke Bank konvensional pakai jaminan dll.tetapi kalau pinjam modal usaha pada program ini tidak pakai jaminan cukup foto copy KTP tanda bukti penduduk asli di kelurahan setempat.

Penutup

Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, dan ketidak berdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Ketidak berdayaan masyarakat miskin berbagai macam bidang kehidupan masyarakat, bidang pendidikan sangat lemah, di bidang politik tidak dapat mengakses informasi kebijakan yyang menyangkut nasib mereka, di bidang ekonomi tidak dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, dikalangan masyarakat termarginalkan di lingkungan masyarakatnya.

Umat islam mempunyai kewajiban untuk mengangkat harkat dan martabatnya kaum fakir miskin. Hal ini banyak peringatan yang disebutkan dalam ayat al qur'an surat AL-Ma'un ayat 1 -3 yang artinya: Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin dan sunnah Rasulullah SAW. Kefakiran lebih mendekati pada Kekufuran, Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.

Untuk mengangkat harkat dan martabat dan menanggulangi masyarakat fakir dan miskin dengan strategi dengan memberdayakan ekonomi masyarakat fakir dan miskin. Strategi yang pertama dengan merubah mindset dari minta-minta menjadi mental pengusaha atau Interpreneurship. Kedua diberi wawasan dan keterampilan usaha. Ketiga diberi modal usaha sehingga mereka dapat menggunakan modal usaha dengan baik dan benar.

Untuk menanggulangi dan memberdayakan masyarakat fakir dan miskin perlu pendamping yang profesional yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, menguasai pendidikan Agama Islam, Interpreneurship dan lain-lain, yang ikhlas selalu mendampingi masyarakat fakir dan miskin sehingga mampu merubah mindset dan perilaku masyarakat fakir dan miskin.

Daftar Rujukan

- Abdul Salam, Pesantren, dan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, Surabaya. Ciputra, Interpreneurship, tahun 2010.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir.
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
- Edi Suharto, membangun masyarakat memberdayakan rakyat, Adi Tama 2003
- Kartini Kartonno, Patologi sosial, PT.Raja Grafindo 1981
- Khoiriyah, Sosiologi Pendidikan Islam, penerbit Teras 2012
- Moh Rifa'i, Moh Zuhri, Terjemahan Kifayatul ahyar, CV Toha Putra 1978
- Mushaf AN-Nahdlah, AL-Qur'an dan Terjemahan, PT.Hati Mas 201
- Saiful Ahyar lubis, Konseling Islam, Jakarta
- Suryana, Kewirausahaan, Salemba empat, Bandung, 2008.
- Syaikh Shafiyurrahman AL-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, Pustaka al-Kausar.
- Wahyu, Wawasan ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional.